

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 112 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

7 Maret 2022

Yth. Gubernur Kepulauan Riau
di

Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai 75,99 atau predikat **"BB"**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.** Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,95	25,07
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,49	19,58
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,82	11,89
d.	Evaluasi Internal	10	7,04	7,04
e.	Capaian Kinerja	20	12,33	12,41
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,63	75,99
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi tahun 2020, sehingga belum terjadi peningkatan yang signifikan dalam implementasi SAKIP.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut:
 - a. Penjabaran kinerja yang disusun masih belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah secara utuh sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hal ini mengakibatkan hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja belum terbangun secara baik dan alternatif solusi belum terlihat;
 - b. Kepemilikan kinerja masih belum sepenuhnya terbangun pada level OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya pimpinan OPD terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
 - c. Upaya efisiensi melalui *refocusing* program kegiatan telah dilakukan, namun masih perlu dimaksimalkan dengan fokus dalam hal penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
 - d. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai menerapkan aplikasi pengukuran kinerja individu dalam rangka memberikan *reward and punishment* untuk memotivasi peningkatan kinerja pegawai. Namun demikian, sebagian kinerja individu yang diukur masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan rutin dan belum berorientasi pada hasil nyata yang dibutuhkan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan *reward and punishment* yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjadi pengungkit dalam memacu kinerja pegawai;
 - e. Inspektorat telah melakukan evaluasi internal SAKIP terhadap OPD, namun hasil evaluasi tersebut belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan pada penerapan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh; dan
 - f. Belum terlihat upaya yang signifikan untuk menjadikan AKIP sebagai pengungkit utama upaya reformasi birokrasi yang dilakukan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menjadikan perbaikan AKIP sebagai dasar dalam penyusunan proses bisnis dan penyederhanaan struktur organisasi unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan terciptanya keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan yang diambil kegiatan sehingga memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja, serta melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
- b. Melakukan proses internalisasi pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan. Hal ini dilakukan untuk mendorong penerapan dialog kinerja sehingga terjadi proses diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan *reward and punishment* bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
- c. Memaksimalkan upaya *refocusing* program/kegiatan dengan menghapus program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam penerapan *reward and punishment* melalui perbaikan aplikasi pengukuran kinerja serta kualitas indikator kinerja agar lebih berorientasi pada kontribusi kinerja yang diberikan setiap individu pegawai bagi organisasinya. Hal ini dilakukan kaitannya dengan upaya memaksimalkan kontribusi setiap pegawai dalam pencapaian kinerja organisasi;
- e. Mendorong peningkatan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, memberikan *professional judgement* secara akurat, serta memberikan rekomendasi yang berkontribusi pada perbaikan akuntabilitas kinerja OPD. Hal ini juga perlu ditambah dengan memastikan seluruh hasil rekomendasi evaluasi untuk dapat ditindaklanjuti; dan
- f. Memastikan perbaikan AKIP digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sampai unit kerja sehingga hasil reformasi birokrasi lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri.